



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & KONGRES ISEI XX

“MEMPERKUAT PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN INDONESIA:
HARMONISASI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL”



KONGRES X
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA
BANDUNG 2018

Bandung, 8 – 10 Agustus 2018

Prosiding Seminar Nasional & Kongres ISEI XX
"Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal"

Panitia Pelaksana :

Ketua : Dr. Prasetijono Widjojo Malang Joedo
Sekretaris : David Sijabat
Bendahara : Anika Faisal
Lisawati

Seminar Nasional : Ni Nyoman Sawitri
Rapat Pleno : Yan Partawidjaja
Humas : L Wulan Tumbleka
Eko B. Supriyanto
Widati

Sekretaris Eksekutif : Firman Sihol Parningotan

Panitia Pengarah :

Ketua : Dr. Ninasapti Triaswati, *UI*
Sekretaris : Dr. Enny Sri Hartati, *INDEF*
Anggota : Prof. Prijono Tjiptoherijanto, *UI*
Prof. Armida S. Alisjahbana, *UNPAD*
Prof. Ina Primiana, *UNPAD*
Prof. Hermanto Siregar, *IPB*
Prof. Bustanul Arifin, *UNILA*
Prof. M. Ikhsan, *UI*
Dr. Halim Alamsyah, *LPS*
Dr. Denni Puspa Purbasari, *UGM*
Rahma Iriyanti, *BAPPENAS*
Lely Pelitasari, *OMBUDSMAN*
Dr. Dinna Wisnu, *ASEAN Secretariat*

Reviewer :

Dr. Ninasapti Triaswati, *UI*
Dr. Aviliani, *IKPIA Perbanas*
Prof. Dr. Armida Alisjahbana, *UNPAD*
Prof. Dr. Ina Primiana, *UNPAD*
Prof. Dr. Hermanto Siregar, *IPB*
Dr. Nimmi Zulfainarni, *IPB*
Dr. Y.B. Kadarusman, *PRASMUL*
Dr. Telisa A. Falianty, *UI*
Dr. M. Edhie Purnawan, *UGM*
Lely Pelitasari, *ME, OMBUDSMAN*

Editor :

Dr. Yuvensius Sri Susilo, *UAJY*
Dr. Amiluhur Soeroso, *STIPRAM*

Managing Editor :

Firman Sihol Parningotan, *MEc*

Penerbit :

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

CXXII & 120 hlm; 21 x 29,7 cm
ISBN : 978-602-14722-5-5
Cetakan Pertama, Desember 2018

Redaksi :

Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp : +62-21-7222463, Fax. +62-21-7201812
Email : isei.pusat@gmail.com
Website : www.isei.or.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Dr. Ninasapti Triaswati (Ketua Tim Editor)	V - VI
Daftar Isi	
VII - VIII	
Laporan Ketua Panitia Pelaksana Daerah	
Dr. Aldrin Herwany	IX
Laporan Ketua Panitia Pelaksana Pusat	
Dr. Prasetyono W.M. Joedo	X - XI
Sambutan Pejabat Gubernur Jawa Barat	
Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.	XII
Sambutan Pelaksana Ketua Umum PP-ISEI	
Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro	XIII - XVII
Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	
Dr. Darmin Nasution	XVIII - XIX
Keynote Speech dan Pembukaan Seminar Nasional & Kongres ISEI XX Wakil Presiden Republik Indonesia	
Bapak H.M. Jusuf Kalla	XX - XXII
Dinner Talk Gubernur Bank Indonesia	
Dr. Perry Warjiyo	XXIII - XXXI
Keynote Speech Chairman of CT Corp	
Chairul Tanjung	XXXII - XLII
Direktur Bina Usaha dan Distribusi Kementerian Perdagangan	
I Gusti Ketut Asta	XLIII - L
Ketua Umum Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI)	
Dr. Handito Joewono	LI - LVI
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)	
Kacuk Suhariyanto	LVII - LXII
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kemenperin	
Gati Wibawaningsih	LVIII - LXXVI
Director, Economic Analysis and Operational Support Division ADB	
Edimon Ginting	LXXVII - LXXXVIII
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian	
Iskandar Simorangkir	LXXXIX - CII
Dirjen Pembinaan & Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja	
Maruli Hasoloan	CIII - CXI
Ketua Umum APINDO	
Hariyadi B. Sukamdani	CXII - CXXII

HARMONISASI TRANSFER FORMAL VERSUS TRANSFER INFORMAL: STUDI EMPIRIS EFEK <i>CROWDING-OUT</i> DI INDONESIA	
Mohtar Rasyid (FEB Universitas Trunojoyo Madura)	1 - 14
KETIMPANGAN GENDER DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA FORMAL DI INDONESIA	
Ema Tusianti (Direktorat Analisis dan Pengembangan BPS) & Abdurrahman (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)	15 - 26
PERKEMBANGAN DAN PERSAINGAN MODAL MANUSIA (<i>HUMAN CAPITAL</i>) INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN SERTA KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN	
Muhammad Ghafur Wibowo (FEB Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	27 - 36
DAMPAK MEROKOK TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN INDIVIDU DI INDONESIA	
Ganiko Moddilani (FEB Universitas Gadjah Mada)	37 - 45
ANALISIS PENGARUH NILAI UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP INVESTASI, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB PROVINSI DKI JAKARTA	
Mohammad Ali Nur Sidiq (FEM IPB) & Muhammad Findi (FEM IPB)	46 - 56
PENGARUH JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA	
Riska Dwi Astuti (FEB Universitas Gadjah Mada), Nadia Fazira (FEB Universitas Gadjah Mada) & Rhodiah Umaroh (FEB Universitas Gadjah Mada)	57 - 62
PENGARUH EL NINO DAN DETERMINAN LAINNYA TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI JAWA	
Fahmi Salam Ahmad (FEM IPB), Hermanto Siregar (FEM IPB), & Syamsul Hidayat Pasaribu (FEM IPB)	63 - 70
ANALISIS PERKEMBANGAN, KINERJA, DAN DAYA SAING KOPERASI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	
Lestari Agusalim (Universitas Trilogi), Muhamad Karim (Universitas Trilogi), & Yaddarabullah (Universitas Trilogi)	71 - 83
HUBUNGAN KREDIT UMKM TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAMBI	
Etik Umiyati (FEB Universitas Jambi) & Zulfanetti (FEB Universitas Jambi)	84 - 92
PENGARUH FINTECH TERHADAP FINANCIAL INCLUSION SERTA FAKTOR YANG MENDUKUNG PERKEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA	
Tuti Eka Asmarani (FE Universitas Gunadarma) & Rusli Abdulah (INDEF)	93 - 100
ANALISIS PENGUKURAN AMPLITUDO DAN FREKUENSI PADA PROSIKLALITAS PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA	
Ecky Imamul Muttaqin (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	101 - 109
PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA MANADO	
Paskanova Christi Gainau (STIE Eben Haezar Manado)	110 - 118
RUMUSAN HASIL SEMINAR NASIONAL & KONGRES ISEI XX	119 - 120

ANALISIS PERKEMBANGAN, KINERJA, DAN DAYA SAING KOPERASI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Lestari Agusalim¹, Muhamad Karim², Yaddarabullah³

¹lestariagusalim@trilogi.ac.id, ²karimlaode1971@trilogi.ac.id, ³yaddarabullah@trilogi.ac.id
¹²³Universitas Trilogi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, kinerja, dan daya saing komparatif Koperasi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Data yang digunakan adalah data keragaan koperasi yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta data ekonomi makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, proyeksi tren, Tipologi Klassen, dan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional (IPEKR) statis dan dinamis. Hasil analisis menunjukkan perkembangan jumlah koperasi aktif meningkat secara absolut, namun secara persentase menurun. Sebagian besar koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, dan tidak memiliki manajer. Modal dan volume usaha terus mengalami peningkatan. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Koperasi Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, Daya Saing, Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the progress, performance, and comparative competitiveness of Indonesia Cooperative in economic development. The data used are cooperative and macro economy data which taken from the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises, and BPS-Statistics Indonesia. Analytical methods used are descriptive method, trend projection, Klassen Typology, static and dynamic Regional Cooperative Economic Performance Index (RCEPI). The results show that the number of active cooperatives is increasing in nominal, but it decreased in percentage. Most of the cooperatives do not conduct the annual members meeting, and do not have any manager. The capital and business volume keep increasing. The contribution of cooperatives to Gross Domestic Product (GDP) is relatively still low. The performance of cooperative increases every year which indicates that there is an increasing of members' welfare. The provinces that have the highest comparative competitiveness are West Kalimantan, East Java, and East Nusa Tenggara. Meanwhile the lowest are North Sulawesi, Riau Islands, and East Kalimantan.

Keywords: Indonesia Cooperative, Pancasila Economic System, People's Economy, Competitiveness, Economic Development

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia telah mengatur perekonomian nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dipertegas bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Berdasarkan landasan tersebut, lahirlah UU No. 12/1967 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian. Dalam UU No. 25/1992, disebutkan bahwa koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kehadiran Koperasi Indonesia tujuan adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

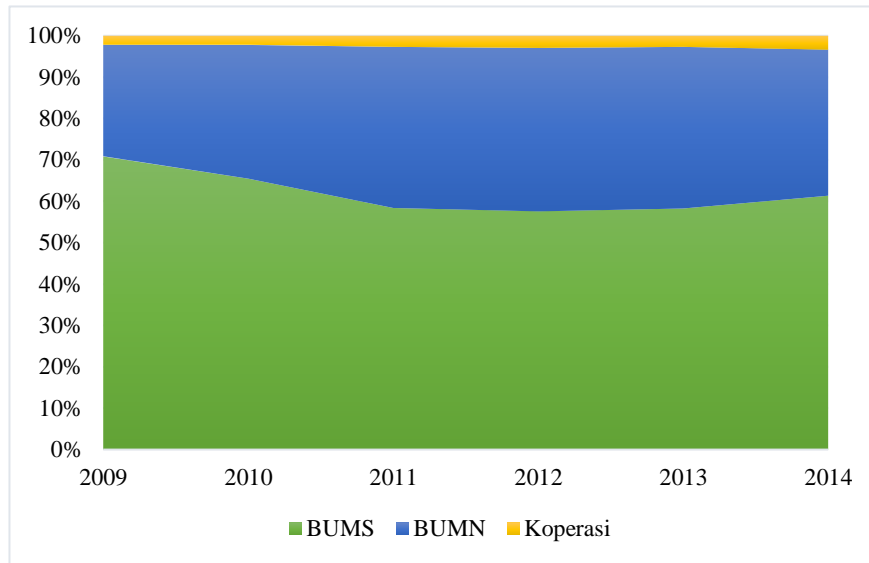
Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor formal selain Badan Usaha milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bersama-sama berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Menurut Tjakrawerdaja *et al.*, (2017) dalam buku Sistem Ekonomi Pancasila, peran ketiga pelaku ekonomi telah diharmonisasikan melalui pola tata peran pelaku ekonomi (PPTPE) agar dapat bersaing sehat. Sektor usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan orang banyak (ekonomi rakyat) haruslah dilaksanakan oleh koperasi. Selanjutnya, sektor usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN karena menyangkut modal besar dan teknologi tinggi sehingga tidak dapat dikerjakan oleh usaha kecil, dilaksanakan hanya oleh BUMN. Rujukannya adalah Pasal 33 ayat (2). Tujuannya adalah untuk menjadi stabilitas dan mewujudkan pemerataan ekonomi nasional. Terakhir, sektor usaha di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikerjakan oleh swasta. Swasta berperan utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan daya saing perekonomian nasional.

Dalam praktiknya, ketiga pelaku ekonomi tersebut dapat melakukan kemitraan yang setara yang berbasis pada asas kekeluargaan. Dengan kemitraan tersebut akan dapat mengoptimalkan dinamika relasi dan interelasi antar pelaku ekonomi sehingga terwujud pasar yang berkeadilan. Kemitraan ini dicirikan dengan, (1) pembagian peran antarpelaku ekonomi harus saling mendukung dan terpadu guna terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional, (2) adanya dinamika berupa kompetisi antarpelaku ekonomi, namun bukan untuk saling mengalahkan dan mematikan, tetapi justru dimaksudkan untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas, (3) adanya fleksibilitas dalam mengakomodasikan berbagai perubahan lingkungan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 1, apabila diamati, Swasta memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, disusul oleh BUMN. Koperasi berada pada urutan terakhir dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang masih relatif kecil (di bawah 5 persen) dibanding pelaku ekonomi lainnya. Kontribusi koperasi terhadap PDB cenderung stagnan. Bahkan, menurut Retnowati (2009) keberadaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat pun makin sering dilupakan. Di antara ketiga pelaku usaha tersebut koperasi merupakan pelaku usaha yang paling lemah.

Kenyataan ini adalah suatu ironi dan kontradiktif dengan harapan Hatta (1978) yang menyatakan bahwa koperasi adalah alat yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat yang terbelakang. Nampaknya, koperasi sebagai ekonomi perjuangan yang disebutkan oleh Swasono (1983) untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, yakni tercapai Negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Sugiharsono (2009) rendahnya peran koperasi menyebabkan masyarakat enggan membicarakan mengenai eksistensi koperasi, apalagi menyangkutpautkannya dengan masalah perekonomian nasional. Aref (2011) menemukan bahwa bahwa masyarakat terutama dipedesaan memiliki persepsi negatif terhadap kontribusi koperasi dalam mengurangi kemiskinan.

Dibalik kecilnya peran koperasi secara nasional, sejak awal sejatinya Koperasi Indonesia diperkenalkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai pelaku usaha kecil mikro (golongan ekonomi lemah) (Rohcmadi, 2011). Pelaku usaha ini tidak mungkin dapat bersaing dengan pelaku usaha lain seperti Firma, CV, dan PT karena tidak efisien (Sugiharsono, 2009). Inefisiensi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang kecil. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha kecil mikro dapat berkumpul dan berkolaborasi sehingga memperbesar skala ekonomi, mampu menciptakan efisiensi, dan peningkatan produktivitas sehingga dapat bersaing sehat dengan pelaku usaha lainnya. Dalam koperasi, para pelaku usaha kecil ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang solid dan kuat yang pada gilirannya menjadi lembaga ekonomi rakyat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat dan sesuai dengan semangat tujuan pembentukan pemerintahan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum.



Sumber: Kemenkop & UKM, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, BPS-Indonesia (diolah)

Gambar 1. Kontribusi Pelaku Usaha Sektor Formal Terhadap PDB ADHB di Indonesia

Sukidjo (2008) menyatakan bahwa Koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berperan untuk menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan negara. Hal serupa dinyatakan oleh Verhofstadt dan Maertens (2015) dan Bharadwaj (2012) bahwa koperasi dapat menjadi lembaga yang efektif dalam memutus lingkaran setan kemiskinan terutama di pedesaan. Smith dan Rothbaum (2013) menambahkan bahwa koperasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia, dan mampu melakukan inovasi sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan analisis untuk memahami lebih mendalam perkembangan Koperasi Indonesia terutama pada era reformasi yang terdiri dari jumlah dan anggota koperasi, rapat anggota tahunan, manajer dan karyawan, modal usaha dan volume usaha. Selain itu, perlu dianalisis kinerja koperasi dalam menyejahterakan anggotanya. Terakhir, mengukur daya saing komparatif koperasi menurut provinsi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Kemenkop & UKM dan BPS. Data yang digunakan adalah data keragaan koperasi tahun 2000-2015, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Kontan (ADHK) tahun 2010-2017, dan PDB 2000-2017. Berdasarkan publikasi keragaan koperasi yang diperoleh dari situs Kemenkop & UKM hanya terdapat data dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Untuk analisis tahun 2016 dan 2017 digunakan analisis proyeksi tren sesuai dengan pola perkembangan data yang dianalisis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk meneliti masalah dan fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif perkembangan dan kinerja Koperasi Indonesia selama periode tahun 2000-2017. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis daya saing keunggulan komparatif koperasi di Indonesia dengan menggunakan metode Tipologi Klassen dan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional (IPEKR) statis dan dinamis dengan periode penelitian selama tahun 2011-2015.

Dalam penelitian ini Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan volume usaha koperasi regional dan volume usaha per koperasi regional. Melalui analisis

ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi koperasi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Dimodifikasi dari Sudirman (2018), Haryadi dan Julyana (2017), Mahardiki dan Santoso (2013), serta Sari dan Mujiono (2013).

IPEKR menjelaskan bagaimana kemampuan relatif ekonomi koperasi secara regional terhadap nasional dengan ekonomi regional terhadap nasional. Dalam penelitian ini IPEKR dibagi menjadi dua, yaitu IPEKR statis (IPEKRS) dan IPEKR dinamis (IPEKRD). Pendekatan analisis berdasarkan IPEKR tersebut diadopsi, dimodifikasi, dan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2017), Ramly (2013) dan Situmorang (2008).

Secara metode, IPEKRS adalah perbandingan antara rasio nilai ekonomi koperasi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai ukuran ekonomi koperasi terhadap rasio ekonomi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai ukuran ekonomi. Persamaan metode IPEKRS sebagai berikut:

$$IPEKRS = \frac{UEKR}{UER} = \frac{\overline{VUKR}/\overline{VUKN}}{\overline{PDRB}/\overline{PDB}} \dots\dots\dots (1)$$

\overline{VUKR} adalah rata-rata volume usaha koperasi regional, \overline{VUKN} adalah rata-rata volume usaha koperasi nasional. Volume usaha koperasi dipakai sebagai indikator ekonomi, karena secara empirik volume usaha mencerminkan kemampuan koperasi dalam bisnis dan ekonomi. Nilai ukuran ekonomi koperasi regional (UEKR) selalu di antara nol dan satu ($0 < UEKR < 1$). Semakin tinggi UEKR semakin besar ukuran regional dalam pengembangan ekonomi koperasi relatif terhadap nasional. \overline{PDRB} adalah rata-rata produk domestik regional bruto, dan \overline{PDB} adalah rata-rata produk domestik bruto Indonesia. PDRB merupakan indikator ekonomi utama regional dan PDB sebagai indikator utama perekonomian nasional. Nilai ukuran ekonomi regional (UER) adalah di antara nol dan satu ($0 < UER < 1$). Semakin tinggi UER maka semakin besar pula kemampuan atau kapasitas ekonomi regional relatif terhadap nasional. Nilai IPEKRS berada antara nol dan tak terhingga ($IPEKRS \geq 0$). Apabila $IPEKRS < 1$ maka performa atau rating regional rendah, dengan kata lain pengembangan ekonomi koperasi di bawah kemampuan ekonomi regionalnya. Sedangkan apabila $IPEKRS > 1$ maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain pengembangan ekonomi koperasi di atas kemampuan ekonomi regionalnya. Oleh karena itu, berdasarkan IPEKRS maka pemeringkatan daerah dapat dilakukan, sehingga peringkat daerah dalam ekonomi koperasi tergantung pada besaran Indeks tersebut.

Selanjutnya, penulis mengembangkan metode IPEKRD dengan melakukan perbandingan antara rasio laju pertumbuhan ekonomi koperasi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai laju pertumbuhan ekonomi koperasi terhadap rasio ekonomi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Metode ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan metode IPEKRS yang belum mampu mengakomodasi perubahan struktur ekonomi koperasi regional dalam kurun waktu tertentu. Persamaan metode IPEKRD sebagai berikut:

$$IPEKRD = \frac{IPPEKR}{IPPER} = \frac{(1+\overline{LVUKR})/(1+\overline{LVUKN})}{(1+\overline{LPDRB})/(1+\overline{LPDB})} \dots\dots\dots (2)$$

\overline{LVUKR} adalah rata-rata laju pertumbuhan volume usaha koperasi regional, \overline{LVUKN} adalah rata-rata laju pertumbuhan volume usaha koperasi nasional. Indeks potensi perkembangan ekonomi koperasi regional (IPPEKR) selalu di antara nol dan tak terhingga ($IPPEKR \geq 0$). Apabila $IPPEKR < 1$ maka performa atau rating regional rendah, dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi koperasi regional di bawah kemampuan ekonomi koperasi nasionalnya. Sedangkan apabila $IPPEKR > 1$ maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi koperasi regional di atas kemampuan ekonomi koperasi nasionalnya. \overline{LPDRB} adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan \overline{LPDB} adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Indeks potensi perkembangan ekonomi regional (IPPER) adalah di antara nol dan tak terhingga ($IPPER \geq 0$). Apabila $IPPER < 1$ maka performa atau rating regional rendah, dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi regional di bawah kemampuan ekonomi nasionalnya. Sedangkan apabila $IPPER > 1$ maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi regional di atas kemampuan ekonomi nasionalnya. Nilai IPEKRD berada antara nol dan tak terhingga ($IPEKRD \geq 0$). Penafsiran IPEKRD sama dengan IPEKRS, kecuali

perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Penulis menilai kedua metode IPEKR tersebut cukup baik untuk menjelaskan peringkat regional dalam pengembangan ekonomi koperasi.

Setelah dilakukan analisis Tipologi Klassen dan IPEKR, selanjutnya dilakukan pemeringkatan secara menyeluruh terhadap seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

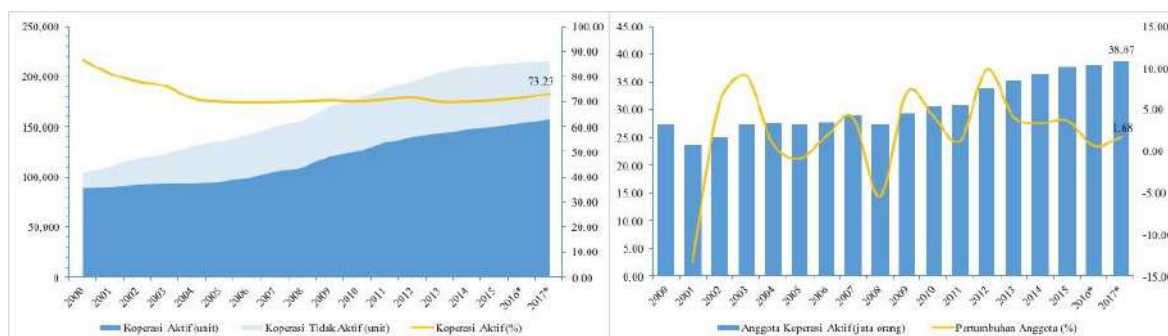
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Koperasi Indonesia

Jumlah Koperasi Indonesia

Selama hampir dua dekade reformasi berjalan, jumlah koperasi mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103,077 unit, naik menjadi 212,135 unit pada tahun 2015. Pada tahun 2017 diperkirakan jumlah koperasi naik menjadi 215.545. Jumlah ini naik sekitar 109.11 persen dalam rentang waktu 2000-2017. Jumlah koperasi aktif juga mengalami peningkatan secara nominal dari 88,930 pada tahun 2000, naik menjadi 150,233 unit pada tahun 2015, dan diproyeksikan naik menjadi 153,171 unit pada tahun 2017. Selama tahun 2000 hingga 2017 terjadi kenaikan 72.24 persen jumlah koperasi aktif. Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM 2009-2014) dalam Buku 100 Koperasi Besar Indonesia yang ditulis oleh Muchtar dan Taufiq (2013) mengatakan bahwa kenaikan tajam jumlah Koperasi Indonesia merupakan representasi dari geliat ekonomi yang semakin baik di level akar rumput (*grassroot*), terutama di pedesaan. Ini adalah sebuah kekuatan ekonomi yang signifikan dalam menekan pengangguran dan kemiskinan. Peran koperasi dalam menekan pengangguran dan kemiskinan telah mendapat pengakuan dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Bahkan diyakini koperasi mampu membangun tata perekonomian yang lebih baik.

Bila diperhatikan dengan saksama Gambar 2, terlihat bahwa walaupun jumlah koperasi aktif meningkat secara nominal, persentase koperasi aktif semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2000, koperasi aktif sebesar 80.28 persen dari total jumlah koperasi, akan tetapi menurun menjadi 70.81 persen pada tahun 2015, walaupun pada tahun 2017 berada di kisaran 71.06 persen. Artinya, dari tahun ke tahun jumlah koperasi yang tidak aktif juga terus meningkat. Ini adalah salah satu masalah serius dari persoalan Koperasi Indonesia. Selain itu, sebaran jumlah koperasi antara wilayah juga sangat tidak merata. Menurut Hartono dan Sarwono (2011) jumlah koperasi terbesar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki dinamika perekonomian yang relatif lebih baik. Kemenkop UKM (2017) merilis data bahwa koperasi lebih banyak berkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dari seluruh koperasi aktif pada tahun 2017, hanya terdapat 44.32 persen yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Selama periode tahun 2000-2017 pelaksanaan RAT kurang dari 50 persen kecuali pada tahun 2015, yaitu sebesar 54.34 persen.



Sumber: Kementerian Koperasi & UKM (diolah)

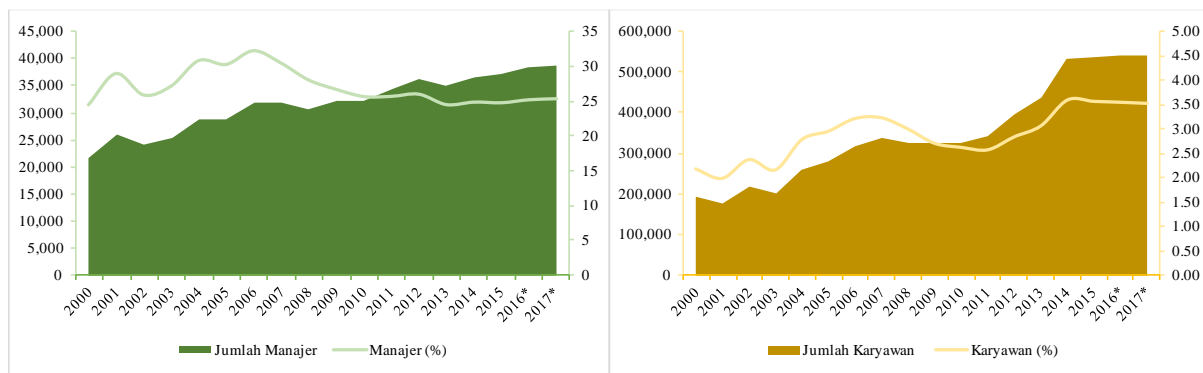
Keterangan: * = hasil proyeksi

Gambar 2. Jumlah Koperasi Indonesia

Pada Gambar 2, terlihat jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan selama periode tahun 2000-2017. Pada tahun 2000 jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 27.30 juta orang naik menjadi 38.67 juta orang pada tahun 2017 (tumbuh 41.67 persen). Fakta ini memperlihatkan bahwa Koperasi Indonesia masih diminati oleh masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan Negara yang secara khusus membuat lembaga kementerian yang menaungi koperasi dan usaha kecil menengah. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Koperasi Indonesia tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan usaha lebih dalam membangun koperasi.

Manajer dan Karyawan Koperasi Indonesia

Koperasi harus berorientasi pada pelayanan usaha yang efisien, menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta dengan tetap mampu menciptakan kestabilan sisa hasil usaha (SHU). Untuk itu dibutuhkan tata kelola organisasi dan manajemen yang baik. Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 580,033 orang pada tahun 2017. 541.205 orang di antaranya merupakan karyawan, dan 38,828 orang lainnya adalah manajer. Walaupun banyak menyerap tenaga kerja, jumlah manajer pada koperasi aktif hanya sebesar 25.35 persen. Artinya, terdapat 74.65 persen koperasi tidak memiliki manajer (114,343 unit). Berdasarkan rata-rata selama tahun 2000 sampai dengan 2017, hanya terdapat 27.07 persen koperasi aktif yang memiliki manajer.



Sumber: Kementerian Koperasi & UKM (diolah)
Keterangan: * = hasil proyeksi

Gambar 3. Manajer dan Karyawan Koperasi Indonesia

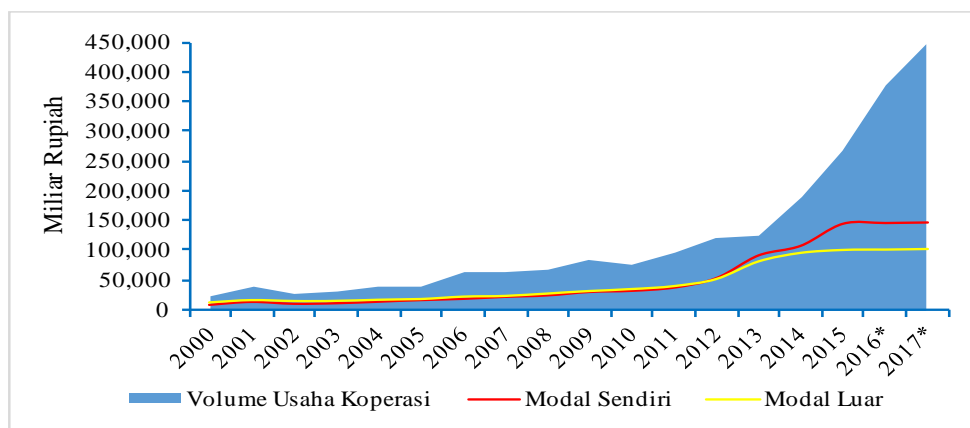
Selain jumlah manajer yang kurang, sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan manajemen koperasi modern. Tidak hanya itu, mereka pada umumnya juga berasal dari kalangan anggota masyarakat yang tidak atau kurang memiliki latar belakang pendidikan formal, maupun informal yang tidak terlalu tinggi, apalagi pengalaman di bidang bisnis. Pada akhirnya, manajer, pengurus, dan pengawas koperasi secara umum juga kurang memiliki wawasan dan kemampuan teknis untuk memproduksi, berdagang dan sebagainya, apalagi kemampuan manajerial untuk menangani suatu kegiatan bisnis (Tjakrawerdaja, 2014). Oleh karena itu, penting untuk membangun kapasitas komite manajemen koperasi dan staf mereka. Selain itu, perlu adanya kesadaran bagi pemerintah pusat dan daerah --terutama yang mengurus koperasi-- untuk memberikan perhatian dan konsentrasi secara sungguh-sungguh dalam mempromosikan dan mengembangkan koperasi (Emana, 2009). Dengan manajerial koperasi yang efisien dan efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan berdampak luar bagi masyarakat.

Modal dan Volume Usaha Koperasi Indonesia

Walaupun koperasi merupakan kumpulan orang, namun untuk melaksanakan usaha tetap dibutuhkan modal. Modal diperoleh baik dari dalam berupa simpanan anggota dan dari luar berupa pinjaman bank dan penyertaan modal. Khusus mengenai penyertaan modal, bisa bersumber dari anggota maupun berasal dari non-anggota. Sumber modal penyertaan ini tidak menyimpang dari

prinsip-prinsip koperasi, karena modal tersebut tetap tidak ada kaitannya dengan suara. Sementara itu, volume usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada periode tertentu.

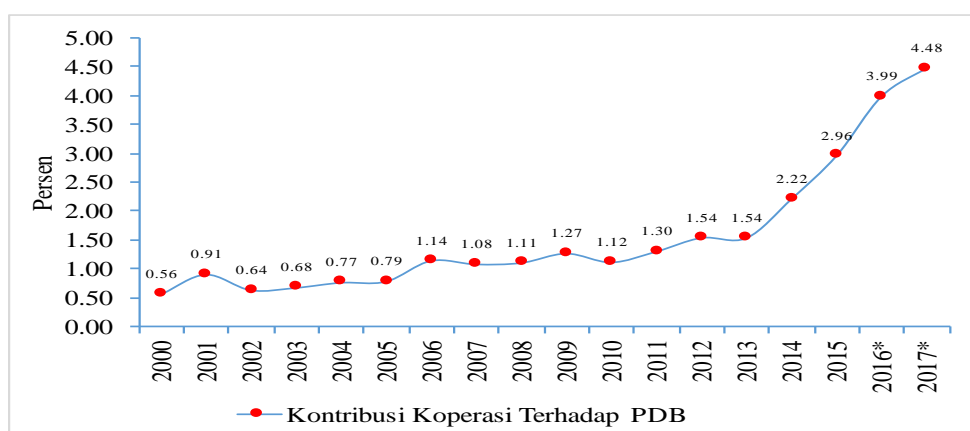
Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa baik modal yang berasal dari anggota koperasi dan dari luar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terutama sejak tahun 2012. Pada tahun 2000, modal sendiri yang dimiliki koperasi sebesar Rp6.81 miliar, naik menjadi Rp144.81 miliar pada tahun 2017. Terjadi kenaikan sebesar 2,024.36 persen. Modal luar pada tahun 2000 sebesar Rp12.47 miliar, naik menjadi Rp101.26 miliar pada tahun 2017. Terjadi kenaikan sebesar 711.89 persen. Selama periode 2000-2011 modal luar lebih banyak dibandingkan modal sendiri. Akan tetapi, sejak tahun 2012 hingga 2017 jumlah modal sendiri melebihi modal dari luar. Sementara itu, terlihat pola perkembangan volume usaha serupa dengan perkembangan modal, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 terlihat volume usaha sebesar Rp23.12 triliun, naik menjadi Rp444.09 triliun. Rata-rata peningkatan volume usaha selama periode tahun 2000-2017 sebesar 1,820.62 persen.



Sumber: Kementerian Koperasi & UKM (diolah)
Keterangan: * = hasil proyeksi

Gambar 4. Modal dan Volume Usaha Koperasi Indonesia

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa kontribusi Koperasi Indonesia terhadap PDB (rasio volume usaha terhadap PDB) menunjukkan tren yang meningkat selama periode tahun 2000-2017. Pada tahun 2000 kontribusi Koperasi Indonesia hanya sebesar 0.56 persen terhadap PDB, naik menjadi 4.48 persen pada tahun 2017. Nilai ini masih kecil jika dibandingkan kontribusi koperasi di negara Prancis (18 persen), Belanda (18 persen), Selandia Baru (20 persen), Singapura (10 persen), Thailand (7 persen), dan Malaysia (5 persen). Diharapkan dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, kedepannya mampu memberi kontribusi yang lebih besar lagi kepada pendapatan nasional.



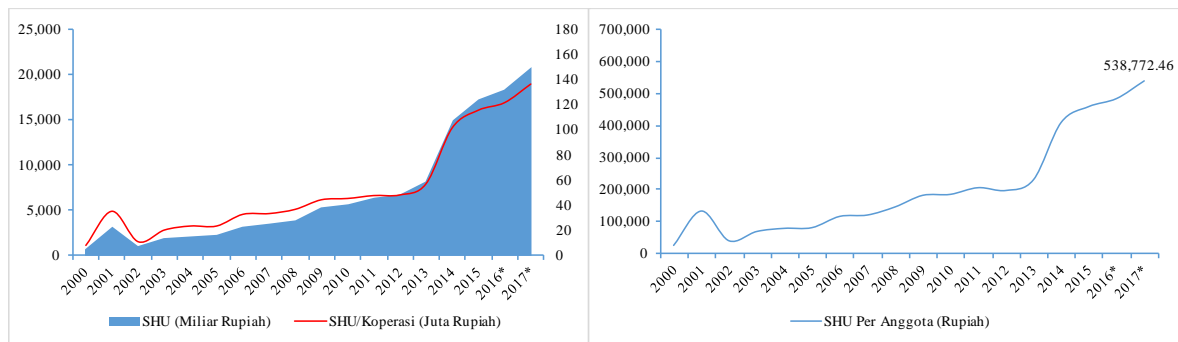
Sumber: Kementerian Koperasi & UKM dan BPS-Indonesia (diolah)
Keterangan: * = hasil proyeksi

Gambar 5. Kontribusi Koperasi Indonesia Terhadap PDB

Analisis Kinerja Koperasi Indonesia

Selanjutnya dilakukan analisis kinerja Koperasi Indonesia. Pengukuran indikator kinerja koperasi berbeda dengan pelaku ekonomi lainnya karena memiliki jati diri yang berbeda. Indikator yang biasa digunakan dalam nilai kinerja koperasi adalah dengan menganalisis perkembangan sisa hasil usaha (SHU) sebagai representatif kesejahteraan anggota. SHU bagi koperasi tetap penting agar koperasi bisa berkembang. Namun, SHU yang tinggi tidak ada artinya apabila diperoleh dengan cara mengeksploitasi anggotanya (Sasongko, 2017).

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa SHU total, SHU per koperasi, dan SHU per anggota mengalami peningkatan dengan pola yang sama terutama sejak tahun 2003 hingga tahun 2017. Total SHU pada tahun 2017 yang dihasilkan oleh Koperasi Indonesia adalah sebesar Rp20.83 triliun, SHU per koperasi sebesar Rp136.02 juta, dan SHU per anggota sebesar Rp538.77 ribu. Rata-rata pertumbuhan SHU selama periode tahun 2000-2017 adalah 38.63 persen untuk SHU total, 34.73 persen untuk SHU per koperasi, dan 39.25 persen untuk SHU per anggota.



Sumber: Kementerian Koperasi & UKM (diolah)

Keterangan: * = hasil proyeksi

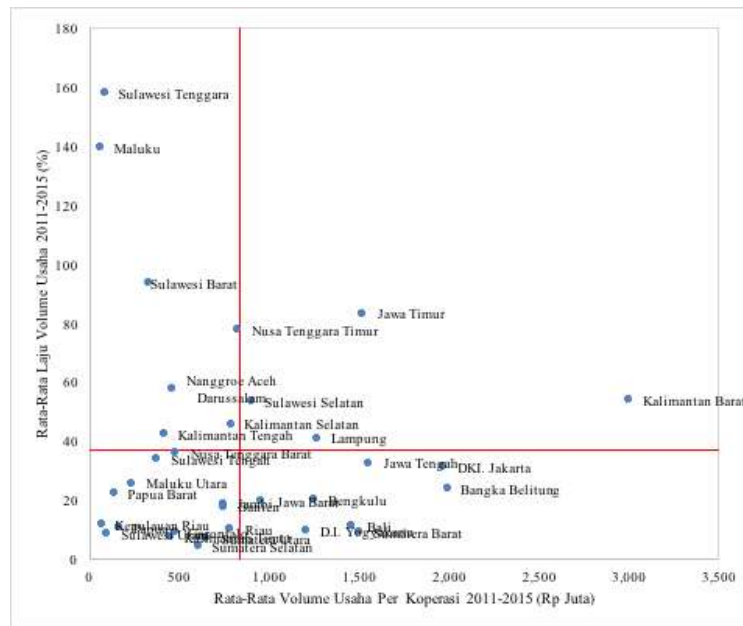
Gambar 6. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Indonesia

Semua aspek yang telah dijelaskan di atas saling memengaruhi satu sama lain. Apabila sistem koperasi dapat dibangun dengan baik, maka akan memiliki dampak terhadap kesejahteraan anggota koperasi (Partomo, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2015), menunjukkan bahwa keberadaan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama apabila jumlah anggota banyak dan tingkat partisipasi tinggi. Syaiful, *et al.* (2016) dan Raidayani dan Faisal (2016) menemukan bahwa modal usaha koperasi yang semakin besar juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Agustina *et al.*, (2016), modal yang berasal dari modal sendiri lebih signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan dibandingkan modal yang berasal dari pinjaman. Pariyasa, *et al.* (2014) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka perlu meningkatkan modal koperasi dan volume usaha. Winarko (2014) menemukan bahwa selain jumlah anggota dan modal usaha, volume aset juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota.

Analisis Keunggulan Komparatif Koperasi Di Indonesia

Analisis Tipologi Klassen

Setiap daerah memiliki kemajuan dan pertumbuhan ekonomi koperasi yang berbeda. Ada daerah yang mampu memacu kegiatan ekonomi koperasinya sehingga dapat tumbuh pesat dan ada pula daerah yang siklus ekonomi koperasinya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan koperasi suatu daerah dengan daerah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis. Gambar 7 menunjukkan visualisasi hasil klasifikasi provinsi berdasarkan Tipologi Klassen dengan *scatter plot*.



Keterangan: Data diperoleh dari Kemenkop & UKM (diolah).

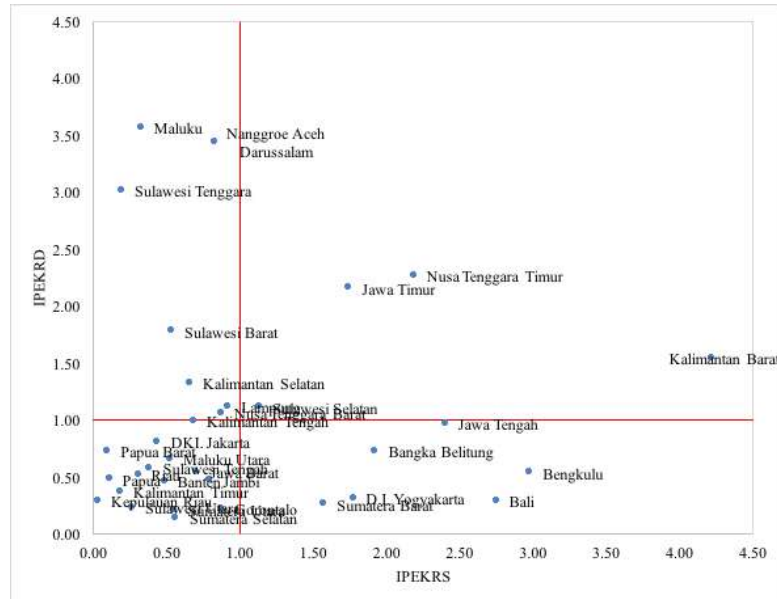
Gambar 7. Klasifikasi Provinsi Berdasarkan Tipologi Klassen dengan *Scatter Plot*

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi empat karakteristik pertumbuhan ekonomi koperasi yaitu:

1. Kuadran I: Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. Terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung karena keempat provinsi tersebut memiliki rata-rata volume usaha per koperasi dan rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
2. Kuadran II: Daerah Berkembang dan Cepat Tumbuh. Terdiri dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah karena memiliki rata-rata volume usaha per koperasi lebih rendah tetapi rata-rata laju pertumbuhan volume usaha lebih tinggi dari rata-rata nasional.
3. Kuadran III: Daerah Maju tetapi Tertekan. Terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, DKI. Jakarta, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Sumatera Barat karena daerah ini memiliki rata-rata volume usaha per koperasi lebih tinggi tetapi rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih dibandingkan rata-rata nasional.
4. Kuadran IV: Daerah Relatif Tertinggal. Terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jambi, Banten, Kepulauan Riau, Papua, Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan karena memiliki rata-rata volume usaha per koperasi dan rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih rendah dibanding rata-rata nasional.

Analisis IPEKR

Pada analisis Tipologi Klassen, klasifikasi daerah hanya mempertimbangkan kemampuan internal koperasi di masing-masing provinsi tanpa memperhatikan aspek kapasitas perekonomian regional yang direpresentasikan oleh PDRB dan PDB. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis IPEKR yang memperhatikan aspek internal koperasi dan aspek eksternal, yakni kapasitas perekonomian regional. Gambar 8 menunjukkan visualisasi hasil perhitungan IPEKR dengan *scatter plot*.



Keterangan: Data diperoleh dari Kemenkop & UKM dan BPS-Indonesia (diolah).

Gambar 8. Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional dengan *Scatter Plot*

Analisis IPEKR digunakan untuk mengklasifikasikan daya saing komparatif provinsi-provinsi di Indonesia menjadi empat karakteristik yang mengukur performa dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi dibandingkan dengan ekonomi regionalnya yaitu:

1. Kuadran I: Performa Tinggi dan Potensi Pertumbuhan Tinggi. Terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan karena pengembangan dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi keempat provinsi tersebut berada di atas kemampuan ekonomi regionalnya.
2. Kuadran II: Performa Rendah Tapi Potensi Pertumbuhan Tinggi. Terdiri dari Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Sulawesi Tenggara karena pengembangan ekonomi koperasi lebih rendah tetapi potensi pertumbuhan ekonomi koperasi lebih tinggi dari ekonomi regionalnya.
3. Kuadran III: Performa Tinggi Tapi Potensi Pertumbuhan Rendah. Terdiri dari Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, dan Sumatera Barat karena pengembangan ekonomi koperasi lebih tinggi tetapi potensi pertumbuhan ekonomi koperasi lebih rendah dari ekonomi regionalnya..
4. Kuadran IV: Performa Rendah dan Potensi Pertumbuhan Rendah. Terdiri dari Provinsi Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, Banten, DKI. Jakarta, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau karena pengembangan dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi berada di bawah kemampuan ekonomi regionalnya.

Setelah menganalisis daya saing koperasi berdasarkan kriteria Tipologi Klassen dan IPEKR, selanjutnya dilakukan pemeringkatan global mengenai daya saing komparatif Koperasi Indonesia berdasarkan provinsi. Tabel 1 memperlihatkan peringkat daya saing Koperasi Indonesia selama periode 2011-2015. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Sementara itu, provinsi dengan daya saing terendah adalah Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, Sumatera Selatan. Provinsi yang secara relatif tidak memiliki keunggulan daya saing perlu mendapat perhatian pemerintah dengan membuat kebijakan pemberdayaan koperasi.

Tabel 1. Peringkat Daya Saing Koperasi Indonesia Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Tipologi Klassen		IPEKR		Total	Rangking
	VU_Ki/VU_K	LVUi/LVU	IPEKRS	IPEKRD		
Kalimantan Barat	1	7	1	7	16	1
Jawa Timur	5	4	8	5	22	2
Nusa Tenggara Timur	13	5	5	4	27	3
Jawa Tengah	4	14	4	13	35	4
Lampung	8	11	11	9	39	5
Sulawesi Selatan	12	8	10	10	40	6
Bangka Belitung	2	17	6	16	41	7
Nanggroe Aceh Darussalam	22	6	14	2	44	8
Sulawesi Barat	26	3	9	6	44	9
Kalimantan Selatan	14	9	18	8	49	10
Bengkulu	9	19	2	20	50	11
DKI. Jakarta	3	15	24	14	56	12
Nusa Tenggara Barat	20	12	13	11	56	13
Bali	7	24	3	27	61	14
Maluku	33	2	26	1	62	15
Kalimantan Tengah	24	10	17	12	63	16
Sulawesi Tenggara	31	1	29	3	64	17
Jawa Barat	11	20	16	19	66	18
D.I. Yogyakarta	10	27	7	26	70	19
Sumatera Barat	6	28	9	29	72	20
Sulawesi Tengah	25	13	25	18	81	21
Maluku Utara	27	16	22	17	82	22
Banten	16	22	23	24	85	23
Jambi	17	21	27	23	88	24
Riau	15	26	27	21	89	25
Gorontalo	21	29	12	31	93	26
Papua Barat	29	18	32	15	94	27
Sumatera Utara	18	32	20	32	102	28
Sumatera Selatan	19	33	19	33	104	29
Papua	28	25	31	22	106	30
Kalimantan Timur	23	31	30	25	109	31
Kepulauan Riau	32	23	33	28	116	32
Sulawesi Utara	30	30	28	30	118	33

Sumber: Kemenkop & UKM dan BPS-Indonesia 2011-2015 (diolah)

Keterangan: VU_Ki = Volume usaha per koperasi provinsi i, VU_K = Volume usaha per koperasi nasional, LVUi = Laju pertumbuhan volume usaha koperasi provinsi i, LVU = Laju pertumbuhan volume usaha koperasi nasional

Berdasarkan analisis mengenai perkembangan, kinerja, dan daya saing Koperasi Indonesia, maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk mendorong agar Koperasi Indonesia dapat berperan lebih besar dalam perekonomian. Hal paling krusial perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pengurus, pengelola maupun anggota koperasi dengan memanfaatkan badan pendidikan dan pelatihan koperasi. Selain itu, para pengurus dan pengelola dapat diikutkan dalam kegiatan temu ilmiah yang relevan, dan belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola koperasi. Perguruan tinggi juga perlu melakukan pendampingan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pengelola koperasi dalam menerapkan teknologi merupakan keniscayaan terutama di era revolusi industri 4.0 ini. Pada era ini, semua jenis pelayanan berbasis teknologi, *internet of thing* dan sosial media. Kelembagaan koperasi juga perlu diefisienkan dengan mengoptimalkan perangkat organisasi. Selain itu, diperlukan audit secara berkala terhadap kegiatan usaha koperasi. Dengan adanya SDM dan kelembagaan yang efisien dapat menciptakan tata kelola koperasi yang sehat dan dilakukan secara demokratis. Tata kelola yang baik ini tercerminkan dari pelaksanaan manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menopang kegiatan usaha koperasi. Koperasi juga membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan untuk dapat mengembangkan usaha. Selanjutnya, diperlukan suatu sistem dan lembaga jaringan usaha koperasi sehingga lebih terintegrasi dan skala ekonomi usaha koperasi menjadi lebih besar dan efisien. Dengan begitu, koperasi akan memiliki keunggulan daya saing.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus mampu menjadi fasilitator agar tercipta kemitraan setara antarkoperasi, juga dengan badan usaha lainnya sehingga tercipta harmonisasi dan persaingan sehat. Kemitraan yang setara ini akan menciptakan relasi saling tergantung antara badan usaha sehingga terdapat “gotong royong” dalam kegiatan ekonomi. Walaupun persaingan terjadi, harus dilakukan secara sehat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Model pasar seperti ini akan dapat terwujud apabila ada pola tata peran di antara para pelaku ekonomi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh negara. Dalam pola tata peran tersebut, koperasi diarahkan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan orang banyak (ekonomi rakyat), bukan oleh BUMN atau BUMS. Dengan adanya penguatan peran Koperasi Indonesia, para pelaku usaha sektor informal seperti pelaku usaha kecil mikro dan petani dapat diyakinkan untuk bergabung dalam koperasi (sektor formal) dengan tujuan untuk menyejahterakan diri mereka secara bersama-sama. Dengan demikian Koperasi Indonesia dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan selama hampir dua dekade reformasi berjalan, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan yang signifikan dari 88,930 pada tahun 2000, naik menjadi 153,171 unit pada tahun 2017 (naik 72.24 persen). Akan tetapi, persentase koperasi aktif semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2000, koperasi aktif sebesar 80.28 persen dari total jumlah koperasi, akan tetapi menurun menjadi 71.06 persen pada tahun 2017. Ini terjadi karena jumlah koperasi tidak aktif juga mengalami kenaikan. Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT kurang dari 50 persen kecuali pada tahun 2015, berkisar 54.34 persen. Berdasarkan rata-rata selama tahun 2000 sampai dengan 2017, hanya terdapat 27.07 persen koperasi aktif yang memiliki manajer. Sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan manajemen koperasi modern. Modal, volume usaha, dan sisa hasil usaha mengalami peningkatan yang signifikan terutama dalam lima tahun terakhir. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Provinsi yang secara relatif tidak memiliki keunggulan daya saing perlu mendapat perhatian pemerintah dengan membuat kebijakan pemberdayaan koperasi.

Hatta (1987) pernah mengajukan sebuah tesis bahwa untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan perlu membangun sistem koperasi terlebih dahulu, sebelum koperasi bisa membangun ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, yang pada gilirannya koperasi dapat menjadi pilar kesejahteraan sosial. Untuk membangun koperasi, hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus, pengelola, dan anggota koperasi. Selanjutnya, diperlukan efisiensi kelembagaan dengan mengoptimalkan perangkat organisasi. Selain itu perlu ada dukungan pemerintah berupa kemudahan akses modal bagi koperasi dan perlu diaturnya pola tata peran pelaku ekonomi agar tidak saling mematikan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutamanya disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan atas bantuan dana Penelitian Dosen Pemula tahun 2018 yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini dan pihak lain yang telah ikut membantu.

REFERENSI

- Agustina, L., Suharno., & Harimurti, F. (2016). Analisis pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi sopir transportasi solo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4): 407-416.
- Aref, A. (2011). Rural cooperatives for poverty alleviation in Iran. *Life Science Journal*, 8(2):38-41.
- Bharadwaj, B. (2012). *Roles of cooperatives in poverty reduction: A case of Nepal*. *Administration and Management Review*, 24(1):120-139.
- Cahyani, M.T. (2015). Pengaruh jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota sebagai variabel intervening pada koperasi simpan pinjam wisuda guna raharja denpasar tahun 2012-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1): 1-10.
- Emana, B. (2009). Cooperatives: a path to economic and social empowerment in Ethiopia. *CoopAfrica Working Paper No.9*. [Internet]. [Diakses 9 Mei 2018]. Diperoleh dari: <http://ilo.org/public/english/employment/ent/coop/africa/download/wpno9cooperativesinethiopia.pdf>.
- Hartono, H., Sarwono, R. (2011). Analisa pengaruh ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 1945 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Binus Business Review*, 2(2): 965-978.
- Haryadi, W., Julyana. (2017). Analisis potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1): 12-25.
- Hatta, M. (1978). *Pengertian Pancasila*. Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional-Jakarta, dengan Lampiran Sila Demi Sila, Jakarta: PT. Inti Idayu Press.
- _____. 1987. *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- _____. 1957. *The co-operative movement in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Mahardiki, D., Santoso, R.P. (2013). Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia 2006-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2): 103-213, doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
- Muchtar, I., Taufiq, M. (2013). *100 koperasi besar Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Majalah Peluang & Infopasar.
- Pariyasa, K.B., Zukhri, A., & Indrayani, L. (2014). Pengaruh modal, volume dan anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha Kecamatan Buleleng. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 4(1): 1-10.
- Partomo, T.S. (2013). *Ekonomi koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raidayani, M.S., Faisal. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2): 168-185.
- Ramly, F. (2013). Peringkat provinsi dalam pengembangan ekspor (metode regional export performance index atau REPI). *Cita Ekonomika (Jurnal Ekonomi)*, 7(2): 1-10.
- Retnowati, D. (2009). Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009)*. UPN "Veteran" Yogyakarta. Hal: F26-F32.
- Rohmadi, I. (2011). Analisis dampak perdagangan bebas dan global pada bergesernya nilai budaya, prinsip dan tujuan koperasi. *Jurnal Ekonomika*, 4(2): 45-51.
- Sari, N.R., Pujiyono, A. (2013). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia tahun 2004-2010. *Diponegoro Journal of Economis*. 2(3): 1-15. Diperoleh dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Sasongko, A.T. (2017). *Analisis keunggulan komparatif dan faktor penentu kinerja koperasi di pulau Jawa*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Situmorang, J.W. (2008). *Peringkat provinsi dalam membangun ekonomi koperasi analisis berdasarkan indeks PEKR*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Smith S.C., Rothbaum, J. (2013). Cooperatives in a global economy: key economic issues, recent trends, and potential for Development. *IZA Policy Paper No. 68*. Diakses 9 Mei 2018]. Diperoleh dari: <http://repec.iza.org/pp68.pdf>.
- Sudirman, M.A. (2018). Analisis sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains (JMAS)*, 3(1): 94-107.
- Sugiharsono. (2009). Sistem ekonomi koperasi sebagai solusi masalah perekonomian indonesia: mungkinkah?. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(1): 21-32.
- Sukidjo. (2008). Membangun citra koperasi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 5(2):193-203.
- Swasono, S.E. (1983). *Membangun koperasi sebagai soko-guru perekonomian Indonesia, dalam mencari bentuk, posisi dan realitas koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia*. Depok: UI Press.
- Syaiful, M., Aedy, H., & Tamburaka, I.P. (2016). Strategi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1): 96-110.
- Tjakrawerdaja, S (2014). *Koperasi Indonesia: konsep pembangunan politik ekonomi*. Jakarta: Universitas Trilogi
- Tjakrawerdaja, S., Purwandaya, B., Lenggono, P.S., Karim, M., & Agusalm, L. (2017). *Sistem ekonomi Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Verhofstadt E., Maertens, M. (2014) Can Agricultural Cooperatives Reduce Poverty? Heterogeneous Impact of Cooperative Membership on Farmers' Welfare in Rwanda, *Applied Economic Perspectives and Policy*, 37(1): 86-106.
- Winarko, S.P. (2014). Pengaruh modal sendiri, jumlah anggota dan aset terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Kediri. *Nusantara of Research*, 1(2): 151-167.